

**PILKADA ACEH TENGAH 2017: ANTARA KONTESTASI DAN
ALIANSI ANTAR *BELAH***

**CENTRAL ACEH REGIONAL ELECTION IN 2017 :
BETWEEN CONTESTATION AND ALLIANCE INTER-*BELAH***

Agung Suryo Setyantoro
Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh
goenktower81@gmail.com

ABSTRACT

This paper focuses on issues of political identity where the use of the issue of kinship in the Central Aceh Regional Election competition in 2017 is too thick. Kinship for the Gayo community in Central Aceh Regency becomes the basis for determining their political choices, which have a "tradition" to divide their community into two *belah* (clans), namely Uken-Toa.

The purpose of this paper is to see the phenomenon of how the Uken-Toa issue is used by the Gayo community as a reference in selecting candidates for the Central Aceh regent in the 2017 regional election. Qualitative research techniques with ethnographic methods start to involve direct observation (observation of participation) and free and in-depth interviews conducted during the research in the field.

In the journey of its history in Gayo, *Uken* and *Toa* are endless issues to be discussed, these two Gayo sub-tribes almost never "make peace". The competition between *Uken* and *Toa* in Gayo almost covers all sectors of life, including in the implementation of the 2017 regional elections. But when we noticed again, the political use of Uken-Toa in the 2017 regional election presents different fragments compared to the pre-reform period. At present, the fragmentation between Uken-Toa is no longer to posit both of them as an opponent but makes them united.

We can see how the duality of the Uken and Toa groups as a mechanism for the distribution of the Gayo community which initially leads to a cultural competition between the two, but at present, it has been reconstructed as a mechanism to build alliances for the sake of winning the election in Central Aceh District. Thus, the paradigm of the Uken-Toa relationship now has transformed from the competition paradigm shifting to the alliance paradigm, and political interest factors are the main factors driving this transformation.

Keyword: Gayo, *Uken-Toa*, *belah*, *kinship*, regional election

ABSTRAK

Tulisan ini fokus pada permasalahan politik identitas dimana penggunaan isu kekerabatan pada kompetisi Pilkada Aceh Tengah tahun 2017 begitu kental terjadi. Kekerabatan bagi masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah menjadi landasan dalam menentukan pilihan politiknya, yang memiliki “tradisi” membagi masyarakatnya menjadi dua kelompok *belah* (klan), yakni Uken-Toa.

Tujuan dari tulisan ini untuk melihat fenomena bagaimana isu *Uken-Toa* digunakan masyarakat Gayo sebagai referensi dalam memilih calon bupati Aceh Tengah pada pilkada 2017. Teknik penelitian kualitatif dengan metode etnografi mulai pengamatan langsung terlibat (observasi partisipasi) serta wawancara bebas dan mendalam dilakukan selama penelitian di lapangan.

Dalam perjalanan sejarahnya di Gayo, *Uken* dan *Toa* merupakan permasalahan laten yang tak ada habisnya untuk dibahas, kedua sub-suku Gayo ini hampir tak pernah “berdamai”. Persaingan antara *Uken* dan *Toa* di Gayo hampir meliputi semua sektor kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan Pilkada 2017. Namun ketika diperhatikan lagi, penggunaan politik Uken-Toa pada pilkada 2017 menampilkan fragmen yang berbeda bila dibandingkan dengan masa pra-reformasi. Saat ini fragmentasi antara Uken-Toa bukan lagi untuk memposisikan keduanya berlawanan tetapi membuatnya menjadi bersatu.

Kita dapat melihat bagaimana dualitas kelompok *Uken* dan *Toa* sebagai mekanisme pembagian masyarakat Gayo yang awalnya mengarah pada persaingan kultural diantara keduanya, namun pada masa kini telah dikonstruksi ulang sebagai mekanisme untuk membangun aliansi bagi kepentingan kemenangan pilkada di Kabupaten Aceh Tengah. Dengan demikian, paradigma relasi *Uken-Toa* saat ini telah bertransformasi dari paradigma kompetisi bergeser pada paradigma aliansi, dan faktor *political interest* menjadi faktor utama pendorong transformasi tersebut.

Kata Kunci: Gayo, *Uken-Toa*, *belah*, kekerabatan, pilkada

PENDAHULUAN

Tahun 2017 merupakan tahun politik yang menentukan bagi orang Gayo di Kabupaten Aceh Tengah untuk memilih bupati dan wakil bupati yang baru dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pergantian kepala daerah di Aceh Tengah menjadi menarik karena bupati petahana telah dua periode menjabat dan tidak dapat maju lagi dalam Pilkada 2017, sehingga kompetisi berlangsung lebih ketat. Walaupun wakil bupati petahana mengikuti kompetisi Pilkada, namun sejak awal masyarakat tidak terlalu antusias dalam mendukung karena selama kepemimpinannya menjadi wakil bupati menunjukkan performa yang kurang menonjol dan seakan-akan hanya menjadi “ban serap”.

Satu hal yang menarik dari Pilkada 2017 di Aceh Tengah ini yakni ketika dalam sistem demokrasi modern para kandidat bupati dan wakil bupati harus berkampanye menawarkan program-program rasionalnya untuk meyakinkan para konstituen agar tertarik dan kemudian memilihnya, namun dalam praktek di lapangan hal ini tidak terjadi. Sisi-sisi primordial diangkat oleh para elite yang bermain ditambah lagi dengan kondisi masyarakatnya yang memang masih memegang tradisi kekerabatan yang kuat, untuk mempengaruhi pilihan konstituen.

Kompetisi Pilkada di Kabupaten Aceh Tengah melibatkan dua kekuatan yang merepresentasikan dua kelompok besar masyarakat Gayo. Lokalitas pilkada di Aceh Tengah menjadi lebih menarik karena primordialisme dalam kompetisi tidak lagi merujuk pada agama ataupun etnis, namun lebih pada kompetisi dua sub-etnis Gayo sebagai mayoritas penduduk di Aceh Tengah. Sub-etnis di Aceh Tengah tersebut terepresentasikan dalam ikatan kelompok klan, atau dalam bahasa Gayo disebut dengan *belah*. Pada Pilkada 2017 isu-isu *belah* muncul di tengah masyarakat yang digunakan untuk menarik massa dukungan.

Salah satu tema yang diangkat dalam berbagai diskusi saat pilkada baik di media sosial maupun perbincangan sehari-hari adalah permasalahan *Uken-Toa* yang tiba-tiba saja terbangun setelah lama “tertidur”. Membicarakan permasalahan “*Uken-Toa*” seakan-akan menjadi hal yang gamang bagi Orang Gayo. *Uken-Toa* bagi

masyarakat Gayo adalah memisahkan mereka menjadi dua bagian yang saling berseberangan. Satu sisi orang Bukit atau yang biasa disebut *Uken*, menyebut diri mereka sebagai penduduk asli atau sekurang-kurangnya sebagai pendatang pertama di daerah Laut (*Lot*) Tawar dengan menghubungkan silsilah mereka dengan Linge, Serule, Aceh dan Johor. Sedangkan orang Cik atau *Toa* disebut sebagai pendatang baru yang berasal dari daerah Batak (lihat dalam PaEni, 2003: 5).

Pro-kontra penggunaan isu *Uken-Toa* pada masa Pilkada 2017 menjadi ramai diperbincangkan orang Gayo. Ada sebagian orang dengan terus terang menolak *Uken-Toa* ini digunakan dalam menjaring massa pemilih pilkada, kelompok ini menganggap bahwa mengangkat isu *Uken-Toa* sama saja memecah-belah Orang Gayo dan dianggap sebagai pendidikan politik yang tidak sehat bagi generasi muda di Gayo. Namun, disisi lain ada juga sebagian orang yang menganggap bahwa menggunakan isu *Uken-Toa* dalam pilkada merupakan hal yang wajar dan memiliki dampak positif bagi Orang Gayo. Kelompok ini beranggapan bahwa dengan mengangkat isu *Uken-Toa* secara tidak langsung akan merekatkan, menyatukan dua kelompok besar masyarakat Gayo dalam satu kesatuan. Ketika nanti menjadi bupati dan wakil bupati, paling tidak ada keterwakilan atau representasi antara orang *Uken* dan *Toa* sebagai pemimpin masyarakat Gayo.

Melihat fenomena yang tergambar di atas, dinamika politik salah satu kabupaten di Aceh ini menarik untuk dikaji. Tarik ulur penggunaan isu *Uken-Toa* pada gelaran Pilkada 2017 di Kabupaten Aceh Tengah kembali menjadi bahan pembicaraan hangat. Di satu sisi ada masyarakat yang sependapat menggunakan isu *Uken-Toa* itu, namun disisi lain ada yang menentang. Dalam realitas yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, kalaulah penggunaan isu *uken-toa* itu sudah dianggap tidak sesuai dengan kemajuan jaman, namun pada realitanya tetap terjadi. Hampir semua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang berlaga di Pilkada 2017 merupakan representasi dari kelompok *Uken* dan *Toa*. Kalau calon bupati dari kelompok *Uken*, maka calon wakil bupatinya berasal dari kelompok *Toa* atau sebaliknya.

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana belah digunakan masyarakat Gayo sebagai referensi dalam memilih calon bupati Aceh Tengah pada pilkada 2017. Kemudian, tulisan ini bertujuan untuk melihat fenomena penggunaan isu *Uken-Toa* oleh masyarakat Dataran Tinggi Gayo di Kabupaten Aceh Tengah pada gelaran Pilkada 2017.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah, sebuah kabupaten yang jika dilihat di peta terletak di tengah-tengah Provinsi Aceh dengan kontur geografis berupa pegunungan, yang dapat dicapai dari ibu kota Provinsi Aceh dengan perjalanan darat selama kurang lebih tujuh jam. Mayoritas masyarakat di Aceh Tengah beretnis Gayo, dimana kebudayaan Gayo masih dipedomani masyarakatnya, walaupun sudah banyak mengalami perubahan di sana-sini.

Penelitian ini mulai dirancang sejak tahun 2016 atau setahun sebelum Pilkada 2017 berlangsung, dimana kasak-kusuk Pilkada sudah ramai dibicarakan masyarakat di Aceh Tengah. Pengamatan melalui media sosial dilakukan untuk mengetahui isu-isu yang berkembang terkait Pilkada, kemudian disambung dengan observasi pertama pada pertengahan tahun 2016, observasi kedua pada Januari 2017 dan observasi ketiga pada bulan September hingga Oktober 2017. Wawancara dilakukan untuk memperkaya data serta mengkonfirmasi hasil observasi sebelumnya dengan menggali informasi melalui wawancara mendalam terhadap masyarakat Gayo sebagai subjek penelitian.

Spradley (1997:3) menyebutkan bahwa etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan. Pendekatan secara etnografis menjadi metode yang dipilih agar peneliti dapat memahami secara lebih baik gagasan-gagasan emik yang langsung diperoleh dari para subyek, karena etnografi adalah pekerjaan langsung di lapangan. Mengerjakan etnografi adalah menetapkan hubungan, menyeleksi informan-informan, mentranskrip teks-teks, mengambil silsilah-silsilah, memetakan sawah-sawah, mengisi sebuah buku harian dan seterusnya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui observasi partisipasi dan wawancara. Observasi partisipasi merupakan salah satu teknik yang sangat efektif untuk melihat, mengetahui, dan merasakan fenomena yang diteliti, sehingga dapat menghasilkan data yang kaya dan deskripsi yang lebih bermakna. Sedangkan wawancara dilakukan dengan wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur atau wawancara bebas. Hal ini dilakukan dengan melihat siapa narasumber yang dihadapi, untuk memperoleh data-data yang terarah dan fokus serta menghilangkan “kekakuan” narasumber dalam menyampaikan data-data.

Subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat Gayo yang berada di Kabupaten Aceh Tengah. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada masyarakat yang terlibat aktif dalam gelaran Pilkada 2017. Wawancara terstruktur dilakukan kepada informan kunci seperti tim sukses baik yang berada di tim inti pasangan calon bupati dan wakil bupati maupun tim sukses di tingkat kampung. Sedangkan wawancara bebas dilakukan kepada masyarakat umum termasuk didalamnya tim sukses. Observasi partisipasi dilakukan dengan mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh peserta pilkada dan berbagai keseharian masyarakat selama penelitian dilakukan.

Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan merupakan sebuah pendekatan interpretif. Analisis interpretif sebagaimana dikemukakan Clifford Geertz bukanlah sebuah ilmu eksperimental untuk mencari dalil-dalil atau hukum yang menggeneralisasi sebuah fenomena, melainkan sebuah upaya untuk mencari makna (Geertz, 1992:5). Dengan demikian peneliti berusaha untuk mengungkapkan makna yang terdapat dalam berbagai informasi dan data lapangan yang ditemukan, termasuk di dalamnya adalah pemaknaan yang diberikan oleh masyarakat Gayo dalam menyikapi Pilkada 2017. Data-data mengenai pilkada sebelumnya juga digunakan sebagai pembandingan, menguatkan analisis pada konteks kekiniannya.

Studi kepustakaan, baik melalui buku-buku dan media-media, dilakukan untuk memperoleh data sekunder mengenai peta politik dan pemerintahan yang berjalan di Kabupaten Aceh Tengah. Pengumpulan data juga penggunaan alat

perekam data visual berupa foto dan video. Data tersebut digunakan untuk memberikan gambaran langsung dan mendekatkan kembali dengan peristiwa untuk membantu pembacaan dan interpretasi terhadap fenomena yang diamati.

Analisis dimulai dengan membuka catatan selama penelitian dan wawancara yang telah ditranskrip, dengan memilah data mana saja yang relevan dengan tema penelitian kemudian menginterpretasikannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Etnis Gayo

Gayo merupakan salah satu etnis “asli” yang terdapat di Provinsi Aceh dengan jumlah terbesar kedua setelah etnis Aceh.¹ Masyarakat etnis Gayo mendiami Dataran Tinggi Gayo, yang berada di tengah-tengah Provinsi Aceh dengan wilayah bertopografi yang bervariasi dan bergunung-gunung. Dengan bentang wilayah yang relatif luas, etnis Gayo tersebar ke dalam enam kabupaten, yakni Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Tenggara dan sedikit di Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Menuju ke wilayah Gayo dapat ditempuh menggunakan jalur udara dimana saat ini sudah terdapat bandara udara Rembele di Kabupaten Bener Meriah yang setiap harinya melayani penerbangan dari Medan menuju Gayo. Selain itu untuk menuju wilayah Gayo dengan jalur darat bisa melalui Kota Bireuen atau lewat Kota Kabanjahe, Sumatera Utara.

Dari hasil penelitian Balai Arkeologi Medan, disebutkan bahwa Dataran Tinggi Gayo telah dihuni oleh masyarakat pra-sejarah sejak \pm 7400 tahun yang lalu dengan ditemukannya tengkorak manusia pra-sejarah di Loyang Ujung Karang dan Mendale, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah (Wiradyana dan Setiawan, 2011: 150). Dataran tinggi Gayo merupakan bagian dari rangkaian Bukit Barisan yang melintasi Pulau Sumatera. Lingkungan alam yang berbukit-bukit ini, rupanya telah

¹ Jumlah penduduk yang mengidentifikasi diri sebagai orang Gayo berjumlah 5% dari populasi di Provinsi Aceh. Lihat Barter, Shane Joshua. 2015. "Between a rock and a hard place: second-order minorities in the Aceh conflict". *Asian Ethnicity*, 2015, Vol. 16, No. 2, hlm. 154, <http://dx.doi.org/10.1080/14631369.2015.1003689>.

menyebabkan orang-orang Gayo terbagi ke dalam kelompok-kelompok (Melalatoa, 1982: 23).

Orang Gayo di Dataran Tinggi Gayo memiliki beberapa sub-etnis antara lain Gayo Lut, Gayo Deret, Gayo Lues, Gayo Alas, Gayo Kalul dan Gayo Lokop Serbejadi. Secara teritorial tempat tinggal *urang* Gayo berdasarkan kabupaten di Provinsi Aceh saat ini adalah: orang Gayo Lut mendiami Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah; Gayo Deret mendiami wilayah Aceh Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues; orang Gayo Lues mendiami Kabupaten Gayo Lues; Gayo Alas adalah orang Gayo yang mendiami Kabupaten Aceh Tenggara; Gayo Kalul adalah orang Gayo yang mendiami Kabupaten Aceh Tamiang; dan Gayo Serbejadi adalah orang Gayo yang mendiami daerah Serbejadi di bagian wilayah Aceh Timur. Dari keenam sub-suku bangsa di Gayo tersebut, Gayo Lut merupakan sub-suku bangsa yang paling dinamis dalam kehidupan sosial-budayanya. Dengan basis kelompok kekeluargaan yang erat, masyarakat Gayo Lut tersegmentasi dalam kesatuan-kesatuan *belah* atau klan.

Pada kelompok etnis Gayo, ada satu faktor penting yang menjadi sumber penggerak dalam kehidupan masyarakatnya yang biasa disebut dengan *belah* atau klan. Menurut Ibrahim dan Pinan (2010: 94), *belah* adalah kelompok orang yang bergabung dalam satu ikatan yang berasal dari satu keturunan atau senasib sepenanggungan atau karena diakui atau diterima sebagai anggota suatu kelompok. Dalam satu kelompok *belah* ini, semua anggotanya mengikat diri pada sistem nilai atau norma yang mereka sepakati sejak nenek moyang mereka, yang digunakan sebagai aturan yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Snouck Hurgronje memahami Gayo dengan menggambarkan kehidupan sosial Gayo melalui serangkaian fenomena yang diselenggarakan di sekitar wilayah dalam sebuah "komunitas kekerabatan". Penguasa desa di Gayo menarik otoritasnya dari gagasan kekerabatan melalui keturunan patrilineal. "Garis keturunan patriarkal," adalah kategori sosial politik Gayo yang dominan yang terdiri dari "keluarga" dan dikelompokkan menjadi "klan" patriarki yang lebih besar (dalam Bowen, 1991: 35).

Sebuah kampung di Gayo biasanya ditandai oleh beberapa ciri. Kampung merupakan tempat tinggal dengan rumah-rumah yang mengelompok padat, di dalamnya terdapat mesjid, *mersah* dan *joyah* dengan *nin*-nya (*nin* adalah kolam air di dekat *joyah* dan *mersah*, untuk mengambil air wudhu atau tempat mandi). Kampung juga biasanya didiami oleh anggota masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam beberapa *belah* (klan). Kampung Bebesen dan Kebayakan merupakan dua diantara kampung asal yang ada di daerah Aceh Tengah. Kedua kampung ini merupakan bagian dari suatu paruh masyarakat (*moiety*) (Melalatoa, 1982: 30-31).

Belah Di Gayo

Orang Gayo secara kultural terikat oleh sistem organisasi sosial yang bernama *belah*, yakni sebetuk kelompok persekutuan hidup yang biasa disebut *kerabat luas*. *Belah* merupakan faktor penting yang menjadi sumber penggerak dalam kehidupan masyarakatnya. Pinan (1998: 25) menyebutkan bahwa *belah* merupakan suatu kesatuan sosial bersifat genealogis. Menurut Ibrahim dan Pinan (2010: 94), kata *belah* berasal dari bahasa Arab “kabilah”, yaitu kelompok orang yang bergabung dalam satu ikatan yang berasal dari satu keturunan atau senasib sepenanggungan atau karena diakui atau diterima sebagai anggota suatu kelompok. Dalam satu kelompok *belah* ini, semua anggotanya mengikat diri pada sistem nilai atau norma yang mereka sepakati sejak nenek moyang mereka, yang digunakan sebagai aturan yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Belah merupakan suatu kelompok persekutuan hidup yang di dalamnya terdiri atas gabungan “keluarga luas”. Keluarga luas ini dahulu mendiami rumah-rumah besar yang disebut *umah pitu ruang* (PaEni,1977: 6). Oleh karena *belah* merupakan gabungan dari beberapa keluarga luas, maka warga *belah* sebenarnya merupakan suatu “kerabat luas”. Kelompok masyarakat yang terikat dengan *belah*, pada masa lalu berdiam diri dalam satu perkampungan.

Belah bagi masyarakat Gayo merupakan identitas yang melekat pada mereka. Dalam setiap tindakan sosialnya dalam bermasyarakat, orang Gayo akan berpedoman pada *belah*. Boleh tidaknya suatu tindakan-tindakan yang akan diambil terkait dengan kepentingan sosial, seperti keluarga atau masyarakat, akan memperhatikan faktor *belah*. Dalam melakukan perkawinan misalnya sangat tabu ketika seorang lelaki menikahi perempuan yang masih satu *belah* dengannya. Dalam berkesenian, pentas *didong jalu* tidak akan menjadi menarik ketika satu *kelop* didong bertanding dengan *kelop* didong lainnya yang masih satu kelompok *belahnya*. Pertarungan syair dalam didong tidak akan seberani dan sedahsyat ketika menghadapi *kelop* didong dari

kelompok *belah* lain.² Masyarakat pun merasa nyaman dan puas dengan sistem seperti itu, dimana kompetisi-kompetisi atas nama identitas *belah* dianggap sebagai sarana untuk menuju puncak dari jati diri Orang Gayo.

Bagi masyarakat Gayo, kesatuan *belah* yang telah tertanam dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam *perimestike* (peribahasa) seperti ungkapan “*mowen/mewen sara tamunen*” (menetap dalam satu tempat), “*beluh sara loloten*” (pergi melalui satu jalan menuju satu arah), “*sara kekemelen*” (merasa satu harga diri bersama), “*tulung berat berbantu*” (bersama-sama mengerjakan yang berat). Konsekuensi dari nilai tersebut bagi anggota *belah* yakni berlakunya norma *sara sedere* (satu saudara) dan *sara kekemelen* (satu rasa malu). Karena itu mereka tidak boleh menikah antara warga satu *belah*. Kalau ada kelompok dari *belah* atau kampung lain memusuhi, merusak atau melanggar kehormatan kampung atau *belah*, terutama melecehkan anggota *belah* perempuan, maka semua warga kampung atau *belah* wajib membela dan mempertahankan (Ibrahim dan Pinan, 2010: 94).

Konsekuensi lain dari ikatan *belah* ini ialah anggotanya harus saling setia dan menghormati. Mereka menggunakan *tutur* (sebutan/panggilan) untuk memanggil seseorang baik itu saudara maupun orang-orang disekitarnya dan bukan dengan memanggil namanya langsung. Menyebut atau memanggil orang dengan namanya langsung bagi orang Gayo sangat tabu, dalam bahasa Gayo disebut sebagai *jis* atau *kemali* (tidak sopan atau tabu). Penggunaan *tutur* ini ditentukan turun temurun dengan berpatokan pada nasab, status, dan usia (Ibrahim dan Pinan, 2010: 94). Al-Gayoni menyebutkan bahwa *tutur* dihasilkan melalui hubungan darah, hubungan pernikahan serta hal-hal lain yang menjadikannya seseorang menjadi “saudara”,

² *Didong jalu* merupakan pertunjukan seni tutur yang paling populer pada masyarakat Gayo. *Didong jalu* mempertandingkan kebolehan seorang *ceh* dalam menyanyikan syair-syair teka-teki dalam Bahasa Gayo. Sistem pertandingan ini saling berbalas syair antara *ceh* dari satu *kelop* dan dibalas kembali syairnya oleh *ceh* dari *kelop* lainnya. Dalam pertandingan syair berbalas syair ini diiringi dengan musik dari tepukan bantal oleh anggota peserta lainnya. Dalam kesenian *didong jalu* selalu dipertandingkan antara dua grup (*kelop*) dari dua kelompok *belah*, *kelop* dari Uken dan *kelop* dari Toa. Tradisi mempertandingkan dua *kelop* dari kelompok *belah* ini sampai saat ini masih berjalan.

seperti dengan adanya kejadian kecelakaan, perkelahian, membantu seseorang dan juga adopsi anak (2012: 7-10).

Bowen (1991: 23) menyebutkan bahwa setiap lelaki atau wanita membangun hubungannya dengan orang lain di masyarakat atas dasar hubungan kekerabatan dan penggunaan istilah yang tepat dari kerabat. Penduduk desa menganggap penting untuk bertindak sesuai dengan norma-norma perilaku tersirat dengan menggunakan istilah kerabat tertentu. Garis utama penghormatan berbasis kekerabatan. Dalam hal ini Gayo berbeda dari orang Jawa, di mana tingkat status formal membentuk interaksi verbal. Bahkan kepala desa biasanya ditangani sebagai seseorang yang berada dalam hubungan keluarga tertentu, dan orang Gayo akan berusaha keras untuk membenarkan memanggil pejabat distrik dengan istilah kerabat Gayo dan bukan dengan gelar Indonesia-nya. Kekerabatan memberikan fondasi pada ideologi egaliter dan melawan hierarki resmi.

Anggota dari satu *belah* biasanya mempunyai tempat tinggal yang sama di sebuah kampung. Berpisahnya anggota *belah* biasa terjadi ketika anggota *belah* telah berkembang dan kemudian bermigrasi ke daerah lain untuk membuka lahan baru sebagai tempat tinggal dan juga tempat untuk bercocok tanam. Perpindahan ini mempunyai konsekuensi harus berpisah dari *belah* induknya dan akhirnya di tempat baru memilih seorang *reje* dari kalangannya sendiri. Walaupun secara pemerintahan sudah tidak memiliki hubungan pengaturan lagi, namun secara genealogis mereka masih terikat dalam ikatan satu *belah* dan menyebabkan anggota mereka tidak dapat melakukan perkawinan dengan anggota *belah* induknya yang telah ditinggalkan tadi.

Dengan adanya larangan adat untuk kawin antara sesama anggota *belah*, seseorang merasa bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan dan harga diri warga *belahnya* dimanapun mereka berada. Tanggung jawab ini terkandung dalam istilah “*dengan*”, yaitu seseorang jejaka (*bujang*) merasa bahwa gadis (*beberu*) dalam *belahnya* adalah saudara kandungnya yang wajib ia jaga dan bela kehormatannya baik ketika berada di dalam kampung halamannya maupun di tanah rantau. Namun yang paling penting dari norma adat larangan kawin antara warga satu *belah* adalah

pelaksanaan wasiat turun-temurun, untuk saling memelihara harga diri atau kehormatan sehingga tidak terjadi perbuatan melanggar syariat dan adat yang bermuara pada terpeliharanya stabilitas dan harmoni masyarakat (Ibrahim dan Pinan, 2010: 95-96).

Dalam *sarakopat*, orang Gayo berada dibawah pimpinan seorang *reje* yang sekaligus adalah keturunan darah yang sama dan ketika ada anggotanya yang pindah ke tempat lain, tidak dapat begitu saja melepaskan hubungan darahnya yang terepresentasikan dalam ikatan *belah*. Hal inilah yang menyebabkan tebalnya rasa solidaritas pada *saudere* pada masyarakat Gayo, terlihat seperti *bela-bela* atau hutang dari *saudere* sendiri adalah juga *bela* atau hutang dari *saudere* satu *belah* yang harus dipikul oleh *saudere* yang lain (Hurgronje, 1996: 55). Kuatnya ikatan inilah yang membuat *belah* tetap bertahan hingga saat ini.

Dalam satu *belah* yang terdapat di Gayo, setiap orang dapat menyebut *sedere* kepada setiap warga *belahnya*. *Sedere* dapat diterjemahkan dengan “saudara” yang mencakup pengertian luas, karena semua warga *belah* termasuk di dalamnya. Kelompok yang lebih kecil dari *sedere* ialah *sukut*. Sukut memiliki sifat selektif, oleh karena itu jumlah anggotanya sangat terbatas pada beberapa orang yang masih mempunyai hubungan darah secara dekat antara satu dengan yang lainnya. kelompok terkecil dalam sistem kekerabatan Gayo disebut *sara berine* (keluarga batih). Prinsip ikatan *sedere* ialah masa lampau yang sama, kisah nenek moyang yang sama, sistem sosial yang sama dan ikatan teritorial yang sama (Mukhlis, 1988: 219-220).

Bagi masyarakat Gayo, perkampungan erat hubungannya dengan *belah* karena teritorial tempat kediaman kerabat atau lokasi perumahan di kampung asal juga merupakan pusat kegiatan ritual. Pada saat-saat tertentu semua warga sesama *belah* di kampung, bersama-sama melakukan berbagai kegiatan upacara antara lain: *turun mani* (upacara memandikan bayi), *mangankuwih* atau *mankuwih* (makan bersama untuk mempererat hubungan sesama *belah* yang dilakukan sesudah panen), perkawinan, upacara kematian, *kenduri tulak bele* (upacara penolak bala), *reraya* (upacara hari

lebaran Islam), *mulot* (maulid nabi), *bereles* (khitanan), dan lain-lain. (PaEni, 2003: 81).

Belah selain sebagai kelompok persekutuan hidup juga dapat dilihat sebagai kesatuan administrasi pemerintahan, walaupun tidak semua demikian. Seperti contoh yang terjadi di daerah Toweren, satu daerah yang dapat ditempuh dengan 10-15 menit perjalanan dari kota Takengon menggunakan motor melewati jalanan yang membentang di sepanjang pinggir Danau Laut Tawar. Di Toweren terdapat empat kampung atau desa administratif yang di dalamnya mewakili *belah* sebagai kekerabatan. Di Toweren anggota masyarakat dalam lingkungan satu kampung adalah *sedere*, mereka terikat oleh hubungan darah antara satu dengan yang lainnya dan juga terikat karena hubungan tali perkawinan dalam masyarakat yang membuatnya menjadi saudara. Hal inilah menyebabkan solidaritas di dalam sebuah desa yang merepresentasikan *belah* anggota masyarakatnya menjadi kuat antara sesama warga kampung. Melalatoa menyebutkan bahwa pada masa lalu dikenal pepatah *setie murip gemasih papa*. Pepatah ini menunjukkan bagaimana mendalamnya sifat setia di antara anggota kerabat, antara anggota satu *belah*, antara orang *se-kampung* (Melalatoa, 1982: 37).

Pada masa lalu Hurgronje (1996: 47), menyebutkan susunan pemeritahan masyarakat Gayo adalah berdasarkan republik yang patrilineal. Mereka tinggal di sebuah rumah besar yang terdiri dari 5-9 ruang, yang masing-masing ruang didiami oleh satu keluarga inti dan terkadang dihuni oleh dua keluarga inti. Keluarga yang mendiami satu rumah terdiri atas keturunan menurut prinsip patrilineal dan jika diperlukan perluasan karena penghuninya bertambah, maka dibangunlah rumah baru yang berdekatan dengan rumah lama dan seterusnya. Demikianlah sebuah pemukiman itu berkembang menjadi sebuah kampung yang terdiri dari beberapa rumah yang masing-masing didiami oleh anggota dari satu *belah*. Kemudian mereka memilih seorang pimpinan di antara mereka yang disebut *reje* (raja).

Seseorang biasanya mengetahui asal *belah* dari cerita-cerita masyarakat yang terbiasa merunut asal-usul *belahnya*. Seseorang dari *belah* Gunung, bertemu dengan

sesama orang Gayo yang baru dikenalnya, biasanya dalam obrolan mereka akan keluar cerita tentang silsilah masing-masing dan dari mana asalnya. Pertanyaan dari mana asalnya, siapa bapaknya, siapa kakeknya, otomatis akan memberikan gambaran informasi sebuah *belah* kepada orang yang bertanya. Ketika hubungan mereka ternyata masih satu keturunan, maka keakraban yang intim akan terjadi dengan panggilan-panggilan (*tutur*) yang didasarkan atas tingkatan dalam kekerabatan atau *belah*. Panggilan atau sapaan yang berdasarkan *tutur Gayo* ini seperti *awan* (kakek), *ama* (ayah), *ucak* (paman), dan lain sebagainya. Hal ini biasa disebut siapa *raliknya*. *Ralik* yaitu bagian dari pohon yang menyimbolkan akarnya atau asal usulnya dari mana (Wawancara Jamhuri. 11 Januari 2017).

Uken – Toa: Dua Paroh Masyarakat Di Gayo

Berbicara masalah etnisitas dikaitkan dengan identitas, menjadi menarik ketika dalam suatu etnis, seperti Gayo menunjukkan dinamikanya. Dinamika pada kelompok etnis Gayo dapat terlihat dengan munculnya pemisahan yang melembaga, khususnya pada kelompok sub-etnis Gayo Lut yang bersumber dari pengelompokan *belah* ke dalam sistem *moiety* atau “paroh-masyarakat”. Pemisahan masyarakat Gayo ini juga berkait erat dengan beberapa kelompok *belah* yang bersatu atas dasar persamaan sejarah dan pembagian geografisnya.

Melalui *belah* ini, orang Gayo mengelompokkan diri dalam satu ikatan emosional dan juga sosial yang berbeda dengan kelompok lainnya. Batasan-batasan yang bisa dan tidak bisa dilakukan seseorang dalam bertindak di dalam kelompoknya maupun di luar kelompoknya sedikit banyak ditentukan melalui ikatan ini. Sebagaimana dideskripsikan oleh antropolog MJ. Melalatoa (1983), masyarakat Gayo dalam kehidupan sosialnya memiliki sistem *moiety*. *Moeity* merupakan pembagian masyarakat dalam suatu wilayah yang dibagi menjadi dua kekuatan besar atau bisa disebut juga sebagai “paroh-masyarakat”. Anggota kedua paroh-masyarakat hidup secara bersaing dalam berbagai permainan adat dan tidak menjalankan adat exogami paroh-masyarakat. Melalatoa juga mengungkapkan berbagai bentuk persaingan/kompetisi dalam berbagai bidang kehidupan antara dua kelompok besar

belah pada masyarakat Gayo-Lut di Aceh Tengah yang telah terjadi sejak lama. Dari penelitian yang dilakukan Melalatoa, kita dapat memahami bagaimana sistem *moiety* menyebabkan munculnya kompetisi antar kelompok *belah* yang sekilas merupakan sumber konflik. Kompetisi itu tidak saja bermakna negatif, seperti timbulnya konflik antar *belah* yang dipicu oleh permasalahan sepele, namun disamping itu juga ada hal positif dari adanya ikatan *belah*. Nilai-nilai positif dari adanya *belah* ialah menjadi pengikat solidaritas dalam masyarakat. Rasa senasib, rasa saling memiliki dalam satu kelompok *belah* kemudian menciptakan kepedulian, saling tolong menolong diantara mereka.

Anggota dari masing-masing paroh melalui penuturan lisan secara turun temurun telah merasa dirinya anggota dari paroh tersebut. Pewarisan tersebut menimbulkan perasaan yang terinternalisasi pada diri setiap anggota dari masing-masing paroh tersebut. Dilihat dari segi lain, *moiety* merupakan sesuatu yang memberikan daya dan napas terhadap kehidupan kemasyarakatan orang Gayo. Adanya *moiety* itu telah merangsang sifat kompetitif bagi masyarakat Gayo. Adanya *moiety* itu telah menyebabkan masyarakat Gayo memiliki sifat yang dinamis. Sebaliknya tanpa dimilikinya pranata itu, masyarakatnya akan tampak lesu, tak bergairah. Hal itu tidaklah dibuat-buat oleh masyarakat itu sendiri, tetapi seolah-olah tumbuh dengan sendirinya dari dalam. Semua itu berpengaruh terhadap dinamika masyarakatnya terhadap pendidikan, mata pencaharian, kesenian dan lain-lainnya (Melalatoa, 1982: 13).

Bowen (1989: 31-34) menyebutkan bahwa, persaingan yang intens dikembangkan antara dua domain dengan berafiliasi pada perasaan menjadi bagian dari *belah* "Bukit" atau "Cik" telah ada sebelum kedatangan Belanda, tapi sekarang hubungan berubah dari saling penghindaran pada *belah* lain menjadi sebuah kompetisi aktif untuk memperebutkan kekuasaan dan keuntungan. Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, persaingan Bukit dan Cik terus berlanjut, dan tempatnya paling tidak di arena pertunjukan Didong. Ketika *kelop* (tim) Bukit dan Cik bertemu di pertandingan selalu menekankan persaingan, mereka menyanyikan

sejumlah lagu-lagu "serangan" yang untuk mengejek karakteristik sosial-ekonomi stereotip masing-masing *belah* dan kekurangan pribadi.

Pada masa sebelum Kabupaten Aceh Tengah dimekarkan pada tahun 2004, paroh Uken menjadi kelompok mayoritas di Kabupaten Aceh Tengah. Dengan terbentuknya Kabupaten Bener Meriah yang mengacu pada Undang-undang No. 41 Tahun 2003, maka wilayah Kabupaten Aceh Tengah dikurangi dengan wilayah Kabupaten Bener Meriah dengan tujuh kecamatan yang mayoritas merupakan paroh Uken, yakni Kecamatan Pintu Rime Gayo; Kecamatan Permata; Kecamatan Syiah Utama; Kecamatan Bandar; Kecamatan Bukit; Kecamatan Wih Pesam; dan Kecamatan Timang Gajah.³ Dengan adanya pemekaran kabupaten tersebut peta politik di Kabupaten Aceh Tengah berbalik, kini paroh Uken menjadi minoritas dengan wilayahnya yang tersisa tiga kecamatan.

Pada saat ini, wilayah paroh Uken berlokasi di sisi timur yakni di Kecamatan Kebayakan, Bintang, dan Laut Tawar. Sedangkan paroh Toa mayoritas penduduknya bermukim di wilayah sebelah barat, yakni dari Kecamatan Bebesen, Pegasing, Ketol, dan Silih Nara. Kedua wilayah paroh ini dalam peta Kabupaten Aceh Tengah terlihat dibelah oleh jalan negara.

Berbeda dengan orang Gayo Bukit (Uken), kalau ada diantara orang Gayo yang bergerak di bidang perdagangan, kebanyakan adalah orang Gayo Cik Bebesen (Toa). Keuletan orang Cik dalam dunia usaha diakui oleh orang-orang Bukit. Faktor ini jugalah salah satu yang membedakan antara kedua sub-suku yang mendiami Kabupaten Aceh Tengah (PaEni, 2003: 52).

Salah satu contoh lain identitas *Uken-Toa* yang melekat pada orang Gayo Lut dapat dilihat dalam kesenian didong. Dalam kesenian didong jelas merepresentasikan kedua paroh sebagai peserta yang beradu tanding, antara *kelop* didong orang Uken melawan *kelop* didong orang Toa. Aura persaingan terlihat cukup kontras dalam

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

gelaran *didong jalu*, saling hantam antar kelompok dilakukan lewat adu puisi yang dinyanyikan oleh *ceh didong* sebagai pemimpin tiap *kelop*.

Keterbukaan informasi dan akses transportasi yang jauh lebih mudah telah banyak mengubah cara bergaul dan bermasyarakat orang Gayo. Terutama dari *belah Cik (Toa)* yang dulunya relatif tertutup. Hasilnya, sekarang di dalam pergaulan keseharian, benturan fisik antara Uken dan Toa sudah hampir tidak pernah terjadi. Ini berbeda sekali dengan situasi di paruh awal tahun 1980-an. Ketika itu bahkan anak sekolahan pun bisa saling beradu lempar batu antara kelompok Uken dan kelompok Toa. Pada masa-masa itu, perbedaan sebutan antara “Siut” dan “Telong” yang dalam bahasa Gayo sama-sama berarti terbakar pun bisa menjadi bahan ejekan yang berujung pada perkelahian antar anak-anak (Nur, 2011).

Uken-Toa: Antara Kontestasi Dan Aliansi Dalam Pilkada 2017

Perubahan sistem pemilu dengan memberikan perluasan hak politik rakyat untuk secara langsung memilih para kandidat tersebut memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pemilih. Ketika rakyat secara langsung dapat memilih nama calon, maka sentimen dan fanatisme personal pada tokoh-tokoh atau kandidat-kandidat tertentu sangat mewarnai perilaku pemilih. Keterlibatan langsung masyarakat ini mengakibatkan peran etnis semakin besar dalam proses perpolitikan. Para kandidat akan memainkan faktor etnisitas sebagai media untuk memenangkan pemilihan, baik untuk Pilkada Gubernur maupun untuk Pilkada Bupati dan Walikota. Etnisitas dan agama bagi bangsa ini merupakan faktor hal primordial dan sering digunakan sebagai alat penguasaan politik. Kentalnya persoalan etnisitas dalam proses Pilkada di Indonesia terlihat dengan jelas dari kombinasi calon Bupati dan Wakil Bupati. Di samping itu, persoalan putra daerah juga menjadi isu yang menarik dalam proses pilkada. Para calon berupaya merekrut pasangannya dari kelompok etnis yang mayoritas pada daerah tersebut. Hal ini wajar saja, karena merupakan strategi untuk memenangkan pertarungan tersebut. Apa yang kita lihat dengan munculnya persoalan etnisitas dalam proses pilkada merupakan suatu fenomena kecenderungan masyarakat kita dalam memilih calon pemimpin yang berasal dari

kelompoknya, dan tidak jarang terlepas dari persoalan visi dan misi serta kualitas calon itu sendiri. (Hasbullah, 2011: 179)

Secara simultan, politik etnis akan memberikan suatu instrumen publik secara langsung untuk mengefektifkan kekuatan psiko-kultural etnisitas. Lebih lanjut dijelaskan tentang langkah-langkah politisasi etnisitas sebagai berikut; (1) menumbuhkan kesadaran warganya secara kognitif tentang relevansi politik terhadap kesejahteraan budaya etnis dan sebaliknya, (2) menstimulasi perhatian warganya tentang pentingnya hal ini bagi kelompok mereka, (3) memobilisasi mereka ke dalam kesadaran kelompok etnis, dan (4) melibatkan mereka secara langsung dalam aktivitas politik yang didasarkan kepada kesadaran, perhatian dan rasa memiliki terhadap kelompok tersebut. (Hasbullah, 2011: 180)

Pilkada Aceh Tengah 2017 bagi masyarakat Gayo merupakan momentum untuk menyalurkan pilihan politiknya dan menaruh harapan masa depannya pada pundak bupati dan wakil bupati pilihan mereka. Walaupun dalam pilkada 2017 yang menjadi permasalahan bukan pada kompetisi antar etnis, namun model yang berjalan dalam pilkada hampir mirip, yakni kompetisi antar sub-etnis, antar kelompok *belah* atau klan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.

Masyarakat Gayo yang oleh Melalatoa disebut merupakan masyarakat yang masih terikat oleh *moiety*, dalam gelaran Pilkada 2017 lagi-lagi mendapati berkembangnya isu lama yang diangkat kembali yakni isu Uken-Toa. Pasangan-pasangan yang maju dalam pilkada oleh partai pengusungnya sengaja menempatkan pasangan-pasangannya dengan komposisi Uken-Toa atau sebaliknya. Masyarakat Gayo sadar bahwa masing-masing pasangan yang maju dalam pilkada merupakan representasi system *moiety* yang masih mereka pegang kuat.

Ketika kita melihat sekilas kondisi masyarakat Gayo saat ini, sistem *moiety* yang membagi masyarakat menjadi dua kelompok antara Uken dan Toa tidak akan tampak. Ketika berinteraksi, masyarakat Gayo dari kelompok Uken dan Toa terlihat cair seakan tidak ada permasalahan tentang asal-usulnya. Konflik yang disebabkan oleh *moiety* pun tidak pernah mencuat dan terdengar.

Masyarakat Gayo dengan basis sosialnya adalah kelompok *belah*, mempunyai ikatan kekeluargaan yang kuat. Pada saat ini, orang Gayo pun menyadari bahwa solidaritas mereka terepresentasikan dalam bentuk *alang tulung*. Saat pilkada 2017 berlangsung *alang tulung* tersebut diwujudkan dalam pilihannya mencoblos kerabatnya yang diusung maju sebagai kandidat dalam Pilkada. Perasaan satu nasib, sepenanggungan, dan saling membutuhkan dalam teritorial kelompoknya menjadikan setiap anggota *belah* tetap terikat sebagai satu kesatuan kelompok. Mereka tidak mau kelompoknya mereka menjadi *inferior* di hadapan kelompok lain, hal ini menjadikan masyarakat akan terus menjaga marwah kelompok.

Dalam Pilkada di Aceh Tengah, masyarakat Gayo mempertimbangkan unsur marwah kelompoknya dalam pilihannya. Dalam masyarakat Gayo ada pantangan adat yang tak boleh diganggu orang atau kelompok lain yang masih dipegang sampai saat ini, dalam usaha mempertahankan harga diri itu terkadang menimbulkan fanatisme berlebihan dari suatu kelompok masyarakat.

Lain lagi dengan seorang anak muda yang aktif mengkampanyekan perubahan di Aceh Tengah, Fauzi dengan “Gerbak” atau Gerakan Rakyat Banyak mengajak anak-anak muda di Aceh Tengah untuk memutus persaingan Uken-Toa. Gerbak sangat aktif menyuarakan penghapusan isu Uken-Toa dalam Pilkada 2017 melalui media sosial Facebook.

“Biasa kalau di musim pemilu, klan itu muncul. Antara dari bagian dari pesisir dan daratan itu muncul. Padahal itu bukan persoalan, karena dalam pergaulan sehari-hari justru tidak ada masalah dengan itu. Kawan-kawan kita banyak yang di Uken. Dulu sebelum pemekaran Bener Meriah dan Aceh Tengah itu satu dan tidak menimbulkan masalah. Kemudian isu Uken-Toa semakin menguat pada masa-masa belakangan ini apalagi ketika ada pemilu. Sekarang aroma itu masih ada. Secara geografis setelah pemekaran, penduduk mayoritas di Aceh Tengah adalah orang Toa. Jadi yang diuntungkan dengan isu itu sebenarnya adalah orang Toa. Sebelum pemekaran dahulu komposisi antara orang Uken dan Toa perbandingannya sekitar 50-50. Tapi setelah pemekaran Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, orang Uken menjadi minoritas di wilayah Kabupaten Aceh Tengah, karena Bener Meriah merupakan wilayah orang Uken”.

“Dikalangan anak muda yang agak moderat saat ini tidak lagi memikirkan persaingan Uken-Toa. Siapa saja tidak masalah untuk maju dalam kompetisi Pilkada. Gerbak muncul karena keprihatinan, dimana susah mencari orang baik, bukan orang pintar. Hampir semua memainkan politik Uken-Toa. Dalam politik, Uken-Toa lebih terasa dibanding belah. Realitas Uken-Toa masih digunakan, cuman kandidat dari Uken tidak berani untuk menyuarakan secara vulgar, karena mereka sadar saat ini adalah minoritas”. (Wawancara Fauzi. 20 Januari 2017)

Perspektif lain yang dicoba dibangun oleh Tim Shafda bahwa memasang kandidat yang berasal dari kedua kelompok belah salah satunya untuk mereduksi adanya sekat-sekat dalam kelompok Uken dan Toa.

“Kita mau tunjukkan ke rakyat Aceh Tengah, kita bisa padukan trah yang dua ini, tidak ada Uken-Toa. Buktinya ini bisa. karena selama ini belum bisa pasangan seperti itu. selama dua kali kontestasi pilkada tidak ada pasangan uken toa. sebelum ini dari Toa aja. Karena itu visi misi Shafda menghapus isu Uken-Toa, karena selama ini, isu tersebut seperti kue lezat yang dipakai untuk kepentingan politik. dibentuk dia”.

“Shabela itu yang dihilangkan sekat-sekat Uken-Toa, dia berasal dari trah Uken, tapi saya kan dari Toa, trah tadi ya, yang saya rasakan itu terimplementasi pada perilaku beliau. Kotak-kotak yang dibangun selama 2 periode itu menjadi alat politik yang lezat untuk meraih suara. terbukti menghapus kotak-kotak itu akhirnya raupan suara Shafda itu merepresentasikan semua kecamatan dari 14 kecamatan, jadi sumber suaranya merata dari semua kecamatan. Shabela itu bupatinya orang Aceh Tengah, itu tercermin dari perolehan suaranya yang hampir merata dari setiap kecamatan”. (Wawancara Samsuddin. 28 September 2017.)

Melihat alasan yang dikemukakan oleh Samsuddin, walaupun ia ingin menghapus isu Uken-Toa, namun dalam realitasnya pemasangan Shabela dan Firdaus dalam paket bupati dan wakil bupati yang diusung oleh partainya tetap saja menggunakan unsur Uken-Toa. Ide-ide untuk menghilangkan sekat Uken-Toa ternyata tidak dapat terwujud dalam tataran praktis, karena secara tidak sadar mereka membutuhkan kemenangan dalam Pilkada. Realitas tersebut paling tidak mampu menggambarkan bahwa isu Uken-Toa masih laku di masyarakat dan mampu

menggiring massa dari kedua kelompok untuk mendukung kandidat yang diusung oleh Samsuddin dan partai koalisinya.

Dalam dunia politik, Uken dan Toa ini sangat menentukan arah seseorang dalam menentukan pilihan calon bupati. Ketika sosok calon bupati atau wakil bupati yang maju dalam Pilkada belum dikenal maka orang-orang akan bertanya, "*Itu calon dari mana? Uken atau dari Toa?*" (Wawancara Kamal Mude. 23 September 2017.)

Kemudian dengan melihat hasil perolehan suara pilkada dimana pasangan Shabela-Firdaus unggul dengan selisih tipis sekitar 2000 suara, menurut Ismed, salah satu tim sukses dan orang kepercayaan pasangan Mukhsin-Taufik, kekalahan pasangannya salah satunya karena faktor banyaknya pasangan dari kelompok Toa yang menjadi calon bupati. Ismed meyakini bahwa tampilnya kandidat dari Toa yang berjumlah lima pasang tersebut memecah suara. Ismed pun juga berargumen kalau salah satu dari mereka tidak jadi tampil atau mengundurkan diri, itu kemenangan berpihak pada pasangan Mukhsin-Taufik.

"Semuanya calon kan enam, orang Toa ini lima calon, lima pasangan calon, sedangkan orang Uken satu pasangan calon, pasangan Shafda itu cuman calonnya. Kemaren ada perbedaan selisih suara cuman dua ribu suara, dua ribu itu kan hanya sekitar 5 TPS, tipis perbandinganya. Uken-Toa sangat besar sekali pengaruhnya, seperti Kecamatan Lot Tawar, Kebayakan, Bintang, daerah ini kebanyakan Uken, 90%. Pasangan Uken mencolok sekali perbedaannya, seperti di depan saya ini TPS-nya, Shafda mendapatkan 80 suara, sedangkan Mukhsin Hasan cuman 40an, beda 50% dalam satu TPS".

"Jadi waktu kami perhitungan quick count itu, di posko pertama kali hitung suara yang masuk duluan seperti dari Kecamatan Celala, Linge, Bebesen, Ketol itu dah menang kami. Kami dah diatas. Karena menangnya pun ga banyak... jadi begitu masuk suara dari tempat lain ini, seperti dari Kecamatan Kebayakan, Bintang, Lot Tawar langsung drop.... trep...trep... (sambil ketawa) ngeri kan... perbedaan dua ribu. Disitulah pusing ya. Karena Shafda ini ibunya orang Bebesen ditambah Firdaus kan, otomatis selain mendapatkan suara Uken, mendapat suara Toa juga. Selain itu, banyaknya kandidat dari kelompok Uken juga berpengaruh pada kami,

sehingga kemenangan kami di Toa tidak signifikan lah. karena direbut oleh 5 calon dari sana semua”.

“Nampak dari perolehan suara itu sangat terasa. Sebetulnya hampir setiap pelosok kami datangi, kunjungi...kunjungi. Betul-betul suaranya seperti itu. Tidak terpikir bahwa yang empat kandidat ini mengganggu yang dari Toa ini kan. Suara Pak Khairul Asmara dan Pak Alamsyah itu 15 ribuan itu rata-rata, belum lagi yang memilih Usman Nuzuli dan Saiful. (Wawancara Ismed. 30 September 2017).

KESIMPULAN

Berbicara tentang dunia perpolitikan di Aceh Tengah maka kita tidak bisa lepas dari fakta persaingan antara dua kelompok masyarakat suku Gayo yang mendiami wilayah Gayo Lut, yang dikenal sebagai persaingan Uken – Toa. Oleh beberapa peneliti, persaingan ini diyakini sudah ada sebelum masa kolonial, kemudian diperuncing oleh pemerintah kolonial Belanda terbawa sampai ke masa kemerdekaan dan terus eksis sampai hari ini. Persaingan ini utamanya terjadi antara dua kelompok suku Gayo dari ‘belah’ Cik yang berpusat di Bebesen dengan ‘belah’ Bukit yang berpusat di Kebayakan.

Ketika hajatan Pilkada 2017 akan digelar, suasana hangat perpolitikan di Aceh Tengah semakin terasa ketika wacana Uken-Toa dihembuskan. Bagi sebagian orang, politik Uken-Toa dianggap memecah belah masyarakat Gayo di Aceh Tengah, namun di sisi lain ada sebagian masyarakat yang justru menganggap menggunakan politik Uken-Toa sebagai upaya untuk mempersatukan masyarakat Gayo.

Sebagai basis penarik massa dalam pilkada 2017, politik Uken-Toa dianggap mampu menarik dukungan dari masyarakat Gayo. Keterwakilan kelompoknya dalam percaturan politik dan pemerintahan dianggap masyarakat mampu memberikan keuntungan.

Identitas-identitas masyarakat yang sebenarnya sudah mencair dan dilupakan kemudian terfragmentasikan ke dalam dua bagian yang semakin jelas memisahkan,

dengan menghembuskan kampanye Uken-Toa. Seakan suasana saat ini kembali ke masa lalu, dimana fragmentasi antara Uken-Toa tergambar cukup jelas.

Namun ketika kita perhatikan lebih detail lagi, penggunaan politik Uken-Toa pada pilkada 2017 menampilkan fragmen yang berbeda bila dibandingkan dengan masa lalu. Saat ini fragmentasi antara Uken-Toa bukan lagi untuk memposisikan keduanya berlawanan tetapi membuatnya menjadi bersatu. Hal ini seperti terlihat pada kasus calon bupati dan sebagai calon wakilnya akan diisi oleh orang yang berasal dari *belah* Bukit atau kelompok Uken atau sebaliknya. Hal inilah yang membedakan “persaingan” antara Uken-Toa di masa lalu yang benar-benar kaku dan fanatik dalam mendukung *belahnya* masing-masing.

Orang awam sekilas akan melihat penggunaan isu Uken-Toa pada Pilkada sebagai fenomena disintegrasi pada masyarakat Gayo, namun masyarakat sendiri tanpa sadar menikmatinya. Menengok kembali apa yang Geertz (2013: 511) tulis dalam *Agama Jawa*, disebutkan bahwa agama tidak hanya memainkan peran yang integratif dan menciptakan harmoni sosial saja di dalam masyarakat, tetapi juga memainkan peran memecah dan dengan demikian, mencerminkan perimbangan antara kekuatan integratif serta disintegratif yang ada dalam tiap sistem sosial.

Politik Uken-Toa, yang bersumber dari *belah* di Aceh Tengah secara tak langsung menggambarkan apa yang diungkap Geertz, dimana politik Uken-Toa pada masyarakat Gayo, pada satu sisi dianggap membawa perpecahan atau disintegrasi masyarakat namun disisi lain juga menciptakan integrasi pada masyarakat Gayo di Aceh Tengah, dimana ketegangan atau kompetisi itu disalurkan melalui ajang pilkada.

Berbeda ketika kita melihat politik identitas pada banyak kasus yang umum dijumpai, bahwa politik identitas selalu terjadi benturan antar identitas etnis, antar identitas agama, dan juga identitas *space*. Di Kabupaten Aceh Tengah, politik identitas yang dimainkan sangat khas, dengan menggalang massa dengan isu

penguatan identitas berbasis *klan (belah)* yang terbagi menjadi dua kelompok, yakni *belah* Uken dan Toa.

Fenomena *belah* masyarakat Gayo yang kemudian masuk dalam pusaran politik modern ternyata memunculkan dinamika yang sangat menarik. Kita dapat melihat bagaimana dualitas *belah* sebagai mekanisme pembagian masyarakat Gayo yang awalnya mengarah pada persaingan kultural diantara keduanya, namun pada masa kini telah dikonstruksi ulang sebagai mekanisme untuk membangun aliansi bagi kepentingan pemenangan pilkada di Kabupaten Aceh Tengah. Dengan demikian, paradigma relasi *belah* saat ini telah bertransformasi dari paradigma kompetisi bergeser pada paradigma aliansi, dan faktor *political interest* menjadi faktor utama pendorong transformasi tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa sangat benar bahwa dalam dunia politik tidak ada lawan dan kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Afthonul. 2015. *Teori Identitas Sosial*. Yogyakarta: UII Press.
- Al-Gayoni, Yusradi Usman. 2012. *Tutur Gayo*. Jakarta: Pang Linge – RCfG.
- Bowen, John R. 1991. *Sumatran Politics and Poetics: Gayo History, 1900-1989*. Yale University.
- Geertz, Clifford. 1992. *Tafsir Kebudayaan (Terjemahan)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hurgronje, C. Snouck. 1996. *Gayo Masyarakat dan Kebudayaan Awal Abad ke-20 (Terjemahan)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ibrahim, Mahmud dan AR. Hakim Aman Pinan. 2010. *Syariat dan Adat Istiadat Jilid 1*. Takengon: Yayasan Maqaammahmuda.
- Melalatoa, M.J..1983. "Pseudo Moiety Gayo: Satu Analisa Tentang Hubungan Sosial Menurut Kebudayaan Gayo". *Disertasi*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Melalatoa, M. Junus. 1982. "Meneliti Pembangunan Masyarakat Desa Gayo di Aceh Tengah", dalam Koentjaraningrat dan Donald K. Emmerson (ed.). 1982. *Aspek Manusia Dalam Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia.

- Mukhlis. 1988. "Belah di Masyarakat Gayo". Dalam M. Yahya Mansur. 1988. *Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan*. Jakarta: Pustaka Grafika Kita.
- PaEni, Mukhlis. 1977. "Belah di Masyarakat Gayo: Studi Kasus di Kebayakan", Kertas Hasil Penelitian. Banda Aceh: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial.
- PaEni, Mukhlis. 2003. *Riak di Laut Tawar: Kelanjutan Tradisi dalam Perubahan Sosial di Gayo Aceh Tengah*.
- Pinan, AR. Hakim Aman. 1998. *Hakikat nilai-Nilai Budaya Gayo (Aceh Tengah)*. Takengon: Pemda Kabupaten Aceh Tengah.
- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Wiradyana, Ketut dan Taufiqurrahman Setiawan, 2011. *Merangkai Identitas Gayo*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Barter, Shane Joshua. 2015. "Between a rock and a hard place: second-order minorities in the Aceh conflict". *Asian Ethnicity*, 2015, Vol. 16, No. 2, hlm. 154, <http://dx.doi.org/10.1080/14631369.2015.1003689>.
- Bowen, John R. "Poetic Duels and Political Change in the Gayo Highlands of Sumatra" *American Anthropologist*, New Series, Vol. 91, No. 1 (Mar., 1989), pp. 25-40 (<http://www.jstor.org/stable/679736>).
- Hasbullah. "Agama dan Etnisitas di Pentas Politik Lokal" dalam *Jurnal Ushuluddin* Vol. XVII No. 2, Juli 2011, (170-182).
- Suryandari, Nikmah. 2007. "Eksistensi Identitas Kultural Di Tengah Masyarakat Multikultur Dan Desakan Budaya Global". Dalam *Jurnal Komunikasi*, Vol. XI No. 01, Maret 2017: 21-28 (DOI: <http://dx.doi.org/10.21107/ilkom.v11i1.2832>)
- Nur, Win Wan. 2011. "Dinamika Sosial Politik Aceh Tengah bagian II: Aceh Tengah di Bawah Kepemimpinan Nasaruddin" dalam <http://www.lintasgayo.com/5986/dinamika-sosial-politik-aceh-tengah-bag-ii.html> (akses: 6 November 2016).